

KEBIJAKAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT MENGIKUTI PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(THE POLICY ON THE ENHANCEMENT OF SOCIETY PARTICIPATION IN ATTENDING PRIMARY EDUCATION IN GUNUNGKIDUL REGENCY)

Oleh: Destyana Hermawati (12110241002), Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, destyana196@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Kebijakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Mengikuti Pendidikan Dasar di Kabupaten Gunungkidul; (2) Pelaksanaan Kebijakan; (3) Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Kebijakan. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di Dinas Dikpora Kabupaten Gunungkidul selama bulan April-Mei 2016. Subjek penelitian adalah pejabat dinas yang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Staff. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis menggunakan model interaktif *Miles and Huberman* yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kebijakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Mengikuti Pendidikan Dasar di Kabupaten Gunungkidul tersusun dalam Kebijakan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan Rintisan 12 Tahun dan terbagi dalam enam program; (2) Pelaksanaan Kebijakan telah didukung dengan komunikasi dari komponen internal dan eksternal, sumber daya manusia yang sejalan dengan kebijakan, sumber keuangan, komitmen dari pihak internal dinas dan eksternal, dan struktur birokrasi yang baku. . Pencapaian APK/APM/APS tingkat SD/SMP yang tinggi, Angka Putus Sekolah serta Angka Mengulang yang menurun. (2) Faktor Pendukung: komitmen dan dukungan seluruh pihak. Faktor Penghambat: keterbatasan SDM dan anggaran serta pemahaman masyarakat.

Kata kunci: Kebijakan Pendidikan, Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Dasar

Abstract

The current research aims to describe: (1) The policy on the enhancement of society participation in attending primary education in Gunungkidul Regency; (2) The implementation of the policy; (3) The supporting factors and the barriers of the education policy implementation. This research is a qualitative study. The research was conducted in Education of Youth and Sports Offices in Gunungkidul Regency from April through May 2016. The research subject was the offices personnel consisting of the Head of the Offices, the Sector Chiefs, the Division Chiefs, and the staffs. The data gathering techniques were interview and document analysis. Miles and Huberman interactive model was used as the analysis technique which encompassed data reduction, data presentation, and conclusion. The validity techniques included source triangulation. Based on the research result, several conclusions are drawn. Firstly, the policy on the enhancement of society participation in attending primary education in Gunungkidul Regency was arranged in a Policy Compulsory 9 years old and 12 years old stub with six Programs. Secondly, the policy has been supported by communications between the internal and the external components, human resources who are in line with the policy, sufficient financial, commitment of the offices personnel to implement the policies and programs, and standardized bureaucracy structure. There is a high attainment of the Gross Enrollment Ratio/ Net Enrollment Ratio of elementary school/junior high school or equivalent. The School Enrollment Ratio, the Drop Out Rate and the Remediation Rate decreases. Thirdly, the supporting factors: the respectful commitment of all part. Meanwhile, the barriers: the limited human resources and finances, and the low awareness of the society.

Keywords: Education Policy, Society Participation, Primary Education

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan modal utama dalam kehidupan manusia. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia mengalami berbagai tantangan baik tantangan global maupun tantangan nasional. Globalisasi ternyata memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan. Masalah nasional yang dihadapi pendidikan di Indonesia hingga saat ini, yaitu: 1) mutu pendidikan, 2) perluasan dan pemerataan layanan pendidikan bermutu, 3) relevansi, 4) efektivitas dan efisiensi, (Nanang Fattah, 2012:30).

Sebagai upaya menyelesaikan berbagai permasalahan pendidikan di atas pemerintah sebagai pemangku kebijakan telah mengeluarkan ber-bagai kebijakan dan program. Keb-ijakan nasional terkait pemerataan pendidikan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Sebagai kebijakan nasional tentunya pel-aksanaan program-program dan kegiatan terkendala secara ekonomi, letak geografis, dan kemampuan setiap daerah. Indikator keberhasilan yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan kebijakan wajib belajar diantaranya angka partisipasi, angka penyelesaian, angka mengulang, angka melanjutkan ke SMP/MTs, dan mutu pendidikan (Nanang Fattah, 2012: 108-112).

Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu pelaksana kebijakan wajib belajar menunjukkan perkembangan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 APK tingkat SD pada tahun 2012 sebesar 100.55%, tahun 2013 sebesar 105.33%, dan tahun 2014 sebesar 96.79%. Pencapaian APK tingkat SMP/MTs pada tahun 2012 sebesar 98.99%, tahun 2013 sebesar 100.40%, dan tahun 2014 sebesar 105.7%. Pencapaian APK tingkat SD/MI terjadi peningkatan pada tahun 2013, tetapi pada tahun selanjutnya justru mengalami penurunan. Dinamika yang terjadi pada tingkat SMP/MTs lebih baik, karena terjadi peningkatan setiap tahunnya (Profil Dinas Dikpora Kab Gunungkidul 2014).

Permasalahan yang muncul dalam implementasi kebijakan wajib belajar merupakan tantangan besar bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Sejalan dengan adanya kebijakan desentralisasi pendidikan pemerintah daerah dan jajarannya memiliki tugas untuk menyusun kebijakan dan program dalam rangka pengembangan daerah khususnya bidang pendidikan. Desentralisasi pendidikan diterapkan untuk peningkatan mutu pendidikan, termasuk masalah perluasan/pemerataan (Siti Irene, 2015: 9).

Titik berat desentralisasi diletakkan pada kabupaten/kota. Oleh karena itu, peningkatan kualitas aparatur pendidikan di daerah amatlah penting. Namun demikian, sejak dilaksanakannya otonomi daerah, pengelolaan sumber daya manusia di daerah baik di provinsi, kabupaten dan kota masih mengalami kendala. Pimpinan daerah (gubernur, bupati, dan walikota) terkadang men-empatkan orang-orang secara serampangan dan kurang memperhatikan profesionalisme. Koordinasi lembaga juga mengalami hambatan karena tidak adanya hubungan yang hirarki antara lembaga satu dengan yang lain (Hasbullah, 2010:23).

Sebagai sebuah proses, menurut Joko Widodo (2008: 43) secara teknis tahapan proses kebijakan publik dibedakan dalam tiga tahapan, yaitu (1) *policy formulation*, (2) *policy implementation*, dan (3) *policy evaluation*.

George Edward III (1980, 1) dalam H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho (2008:222-223) menyatakan bahwa suatu keputusan kebijakan tanpa implementasi tidak akan mencapai kesuksesan. Edward menyatakan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *communication*, *resources*, *disposition or attitudes*, dan *bureaucratic structures*.

Sabatier dan Mazmanian dalam Sudiyono (2007: 90-100) mengemukakan adanya berbagai kondisi yang mendukung agar implementasi dapat dilaksanakan secara

optimal yaitu: program harus mendasarkan diri pada sebuah kajian teori yang terkait, Undang-Undang atau peraturan tidak boleh ambigu atau bermakna ganda, Para pelaku kebijakan harus memiliki kemampuan manajerial, dan politis dan komitmen terhadap tujuan yang akan dicapai, Program harus didukung oleh para pemangku kepentingan, Prioritas umum dari sasaran perundang-undangan harus jelas.

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan dan atau program pendidikan tidak terlepas dari beberapa faktor penentu keberhasilan dan kegagalan. Arif Rohman (2014: 147-150) menjelaskan terdapat tiga faktor yang menjadi sumber kegagalan dan keberhasilan, yaitu 1) faktor yang terletak pada rumusan kebijakan, 2) faktor yang terletak pada personil pelaksana, dan 3) faktor yang terletak pada system organisasi.

Syarat implementasi kebijakan agar dapat dilaksanakan dengan optimal adalah tergantung pada faktor ketepatan sasaran, sumber dana, sumber daya manusia, koordinasi, dan dukungan seluruh pihak (Sudiyono, 2007: 93-97).

Berdasarkan uraian di atas bahwa proses pelaksanaan kebijakan wajib belajar tidak selalu mudah dilaksanakan. Padahal sebagai kesatuan proses kebijakan, regulasi yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan merupakan hal penting yang harus dikaji dan diteliti. Seperti yang disampaikan oleh Yosol

Iriantara & Usep Syaripudin (2013:144). Pemerintah khususnya dinas pendidikan merupakan salah satu komponen dalam lingkungan strategis pendidikan. Melalui kebijakan dan regulasi yang diterbitkan, pemerintah mempengaruhi proses pendidikan dan kelembagaan pendidikan. Oleh karena dilakukan penelitian untuk mengetahui: Apa saja Kebijakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Mengikuti Pendidikan Dasar di Kabupaten Gunungkidul? Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan tersebut? dan Bagaimana Faktor Pendukung serta Penghambat dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Terkait Peningkatan Partisipasi Masyarakat Mengikuti Pendidikan di Kabupaten Gunungkidul? Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan kebijakan yang ada dalam peningkatan partisipasi masyarakat mengikuti pendidikan dasar di Kabupaten Gunungkidul, pelaksanaan kebijakan tersebut dan faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Manfaat dari hasil penelitian dapat digunakan sebagai evaluasi oleh Pemerintah Daerah terhadap DinasDikpora Kabupaten Gunung-kidul dan dapat meningkatkan komunikasi seluruh pihak dalam penyelenggaraan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Bogdan dan Taylor (1975) dalam Lexy J. Moleong (2005: 4) mendefinisikan metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul yang beralamat di Jl. Pemuda No. 32. Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan April- Mei 2015.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pejabat dinas yang bertugas di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul. Para informan yang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepala dan Staff Bidang Perencanaan, Kepala dan Staff Bidang Sekolah Dasar, Kepala dan Staff Bidang Pendidikan Lanjut Pertama (PLP), dan Ketua/ Staff Bidang PAUDNI.

Prosedur Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan studi dokumen, dimana peneliti sebagai *human instrument*. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles and Huberman yang terdiri

atas *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/ verification* (Sugiyono, 2013: 334-335). Teknik keabsahan data yang digunakan adalah dengan ketekunan pengamatan dan triangulasi sumber (Lexy J. Moleong, 2005: 30).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Mengikuti Pendidikan Dasar di Kabupaten Gunungkidul

Kebijakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Mengikuti Pendidikan Dasar tersusun dalam Kebijakan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan Rintisan 12 Tahun. Kebijakan tersebut terbagi kedalam program dan kegiatan dalam pelaksanaannya. Program tersebut adalah program Wajib Belajar 9 tahun dan terbagi ke dalam 6 (enam) program. Program-program tersebut adalah: a) penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiya, b) Penyediaan dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI & SMP/MTs, c) Penyelenggaraan Paket A setara SD, d) Penyelenggaraan Paket B setara SMP, e) penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar, f) sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan.

Kebijakan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan Rintisan 12 Tahun terdiri dari program Wajib Belajar 9 tahun dengan 6

(enam) program. Sebagaimana yang disampaikan oleh Donald S. Van Meter dan Carl Van Horn bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilaksanakan oleh Negara, Pemerintah, individu, kelompok, dan swasta untuk mencapai tujuan kebijakan (Sudiyono, 2007: 80). Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pendidikan melaksanakan kebijakan melalui penyusunan program agar tersusun tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan

2. Pelaksanaan Kebijakan

Berdasarkan teori implementasi George Edward III (1980, 1) dalam H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho (2008: 222-223) menyatakan bahwa suatu keputusan kebijakan tanpa implementasi tidak akan mencapai kesuksesan. Edward menyatakan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *communication*, *resources*, *disposition or attitudes*, dan *bureaucratic structures*. Pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi dilakukan baik internal Dinas Dikpora Kabupaten Gunungkidul maupun eksternal. Komunikasi kebijakan secara internal dilakukan oleh orang-orang yang berada di Dinas Dikpora Kabupaten Gunungkidul, sedangkan komunikasi eksternal dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah, BAPPEDA, DPPKAD, Adm. Pembangunan, Sekolah, dan masyarakat. Berkaitan dengan aktivitas

komunikasi pihak intern Dinas Dikpora Kabupaten Gunungkidul juga terus melakukan koordinasi. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dilakukan hampir setiap minggu. Sedangkan koordinasi antar Dinas atau SKPD dilakukan sekali setiap bulannya, yaitu setiap tanggal 17. Sosialisasi tersebut melalui Kegiatan Dorongan Wajar 9 tahun dan Perintisan wajar 12 tahun. Sosialisasi diselenggarakan di seluruh wilayah di Kabupaten Gunungkidul tetapi focus utama di daerah pesisir pantai selatan seperti Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Saptosari.

Koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan oleh agen pelaksana sesuai dengan syarat implementasi bahwa pelaksanaan kebijakan memerlukan adanya koordinasi yang kuat antar berbagai agen atau lembaga implementor dan memerlukan dukungan dari seluruh pihak baik internal maupun eksternal (Sudiyono, 2007: 93-97).

b. Resources

Menurut Sabatier dan Mazmanian implementasi dilakukan dengan menunjuk orang-orang atau lembaga yang memiliki orientasi kebijakan yang sejalan dengan kebijakan (Sudiyono, 2007: 93-97). Pelaksanaan kebijakan peningkatan masyarakat mengikuti pendidikan dasar di Kabupaten Gunungkidul telah didukung oleh orang-orang yang sejalan dengan kebijakan.

Komponen yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan terdiri dari komponen khusus dan komponen umum. Komponen khusus merupakan anggota di Dinas Dikpora sedangkan komponen umum adalah pihak eksternal di luar Dinas Dikpora. Dukungan dana untuk pelaksanaan kebijakan berasal dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, BOS Pusat, BOSDA DIY, dan APBD Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan pelaksanaan kebijakan dilaksanakan setiap tahun dengan pengalokasian waktu tersusun per triwulan.

c. Disposisi

Komitmen dari implementor memiliki pengaruh kuat dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Para pelaku kebijakan harus memiliki kemampuan manajerial, dan komitmen terhadap tujuan yang akan dicapai (Sudiyono, 2007: 90). Komitmen dari pelaksana kebijakan di Dinas Dikpora Kabupaten Gunungkidul telah ditunjukkan melalui kemauan dalam melaksanakan rencana yang telah ditetapkan.

Agen pelaksana memiliki komitmen karena mereka memang “bekerja untuk itu”, untuk menyelenggarakan pendidikan yang merata dan bermutu. Tanggapan dari seluruh pihak dinas yang terlibat mendukung. Pemerintah daerah sebagai lembaga yang lebih tinggi juga terus memberikan motivasi kepada pelaksana dalam hal ini Dinas Dikpora untuk terus

memfasilitasi sekolah sehingga dapat memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

d. Struktur Birokrasi

Faktor yang menentukan kegagalan dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan salah satunya adalah faktor organisasi pelaksana. Organisasi pelaksana menyangkut jaringan system, hirarki kewenangan masing- masing peran, dan aturan main organisasi (Arif Rohman 2014: 147-150).

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan sesuai dengan Struktur Baku yang sudah ada di Dinas Dikpora Kab. Gunungkidul. Struktur birokrasi yang ada mengandung hubungan linearitas dan hubungan koordinatif. Hubungan linearitas terjadi pada atasan dan bawahan, seperti kepala dinas dengan kepala bidang atau kepala bidang dengan staff bidang. Sedangkan hubungan koordinatif terjadi antar bidang atau antar staff dalam satu bidang.

e. Pencapaian Partisipasi Masy-arakat Mengikuti Pendidikan Dasar di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD/MI tahun 2013-2015 mengalami dinamika, tetapi di Tingkat SMP/ MTS lebih mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pencapaian dalam tabel berikut:

Tabel. Pencapaian APK dan APM Tingkat SD/Mi dan SMP/MTS.

Aspek	SD/MI			SMP/MTS		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
APK	105.33	96.68	103.08	100.4	102	115.
APM	90.19	90.35	92.54	78.09	79.92	91.98

APK di Kabupaten Gunungkidul untuk tingkat SD/MI di atas 100% yaitu 105,33 persen. Hal ini menunjukkan bahwa yang bersekolah di SD tidak hanya usia pendidikan SD (7-12 tahun) tetapi juga diluar usia tersebut. Seharusnya sebagaimana peraturan bersama antara Mendiknas dan Menag Nomor 04/VI/PB/2011 dan MA/111/2011 bahwa usia siswa SD dan MI adalah Usia 7 Tahun sampai 12 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan usia pencapaian angka partisipasi kasar di Kabupaten Gunungkidul masih ada sebagian yang bersekolah di Tingkat SD/MI berada diluar usia yang seharusnya.

APM SD/MI maupun SMP/MTS di Kabupaten Gunungkidul belum mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa SD/MI dan SMP/MTS bersekolah tidak pada usia yang tepat yakni usia 7-12 tahun untuk SD/MI dan 13-15 tahun untuk SMP/MTS. APM sebenarnya digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah pada jenjang tertentu secara tepat waktu. Pada tahun 2015 APM SD/MI mencapai 92,54% ini berarti sebesar 92,54% siswa bersekolah sesuai usia yakni berada di usia 7-12 tahun sedangkan 7,46% yang lain berada di luar usia tersebut. Pada tingkat SMP/MTSI tahun 2015 APM mencapai

91.98% ini berarti 91.98% siswa berada di kisaran usia 13-15 tahun, sedangkan 8.02% berada di luar usia tersebut.

Angka mengulang merupakan persentase dari jumlah siswa tinggal kelas pada tingkat pendidikan tertentu dibanding dengan jumlah siswa yang bersangkutan. Angka ini dapat dijadikan sebagai ukuran Dinas Pendidikan dan sekolah dalam memberikan perhatian kepada siswa yang rentan terhadap putus sekolah. Angka mengulang SD/MI menunjukkan penurunan di setiap tahunnya. Tahun 2013 angka mengulang SD/MI mencapai 1602 tetapi tahun 2015 menurun di angka 655. Angka mengulang tingkat SMP/MTS justru mengalami peningkatan pada tahun 2015 yaitu 33 siswa dari angka 30 siswa di tahun sebelumnya.

Angka putus sekolah SD/MI terus mengalami penurunan setiap tahunnya tetapi untuk tingkat SMP/MTS menurun tahun 2014 dan tahun 2015 mengalami peningkatan.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendukung

Stakeholders pendidikan memiliki kemauan untuk memahami visi dan misi RPJMD, Komitmen pemerintah daerah mengembangkan SDM, sarana prasarana, dan anggaran yang memadai, Komunikasi yang baik antara Dinas Dikpora dengan Pemerintah Daerah dan jajarannya, Adanya peluang penyelenggaraan pendidikan

inklusi di sekolah regular, Kemauan masyarakat untuk diberikan penjelasan tentang kebijakan pendidikan gratis.

b. Faktor Penghambat

Keterbatasan SDM dan anggaran, Faktor geografis dan demografis menyebabkan tidak maksimalnya angka partisipasi di Kabupaten Gunungkidul, Pemahaman masyarakat tentang pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang masih rendah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kebijakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Mengikuti Pendidikan Dasar di Kabupaten Gunungkidul tersusun dalam Kebijakan Penuntasan Wajib Belajar 9Tahun dan Rintisan 12 tahun. Berdasarkan kebijakan tersebut selanjutnya dibagi dalam enam program.

Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Mengikuti Pendidikan Dasar di Kabupaten Gunungkidul sudah berjalan. Pelaksanaan kebijakan telah didukung dengan komunikasi dari komponen internal dan eksternal, sumber daya manusia yang sejalan dengan kebijakan, sumber keuangan yang berasal dari berbagai sumber, komitmen dari seluruh pihak dan struktur birokrasi yang baku. Pencapaian APK/APM/APS tingkat SD/SMP yang tinggi, Angka Putus Sekolah serta Angka Mengulang yang menurun.

Faktor Pendukung: komitmen dan dukungan seluruh pihak. Faktor Penghambat: keterbatasan SDM, kondisi geografis dan demografis, kurangnya anggaran serta pemahaman masyarakat yang masih lemah terhadap pendidikan dasar.

Saran

Perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi Wajar Dikdas 9 Tahun terutama di wilayah yang terdapat anak putus sekolah dan anak lulusan SD yang belum melanjutkan ke SMP, komunikasi dengan masyarakat melalui pemerintahan di kecamatan/ desa

Daftar Pustaka

- Arif Rohman. (2014). *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- H.A.R Tilaar & Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasbullah. (2010). *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Joko Widodo. (2008). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Jatim: Bayumedia Publishing.
- Lexy J. Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nanang Fattah. (2012). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Profil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014.
- Siti Irene Astuti Dwiningrum. (2015). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis dan Empirik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Solichin Abdul Wahab,Haji. (2014). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudiyono. (2007). *Buku Ajar: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: UNY.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Yosal Iriantara & Usep Syaripudin, M.Ed. (2013). *Komunikasi Pendidikan*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.